

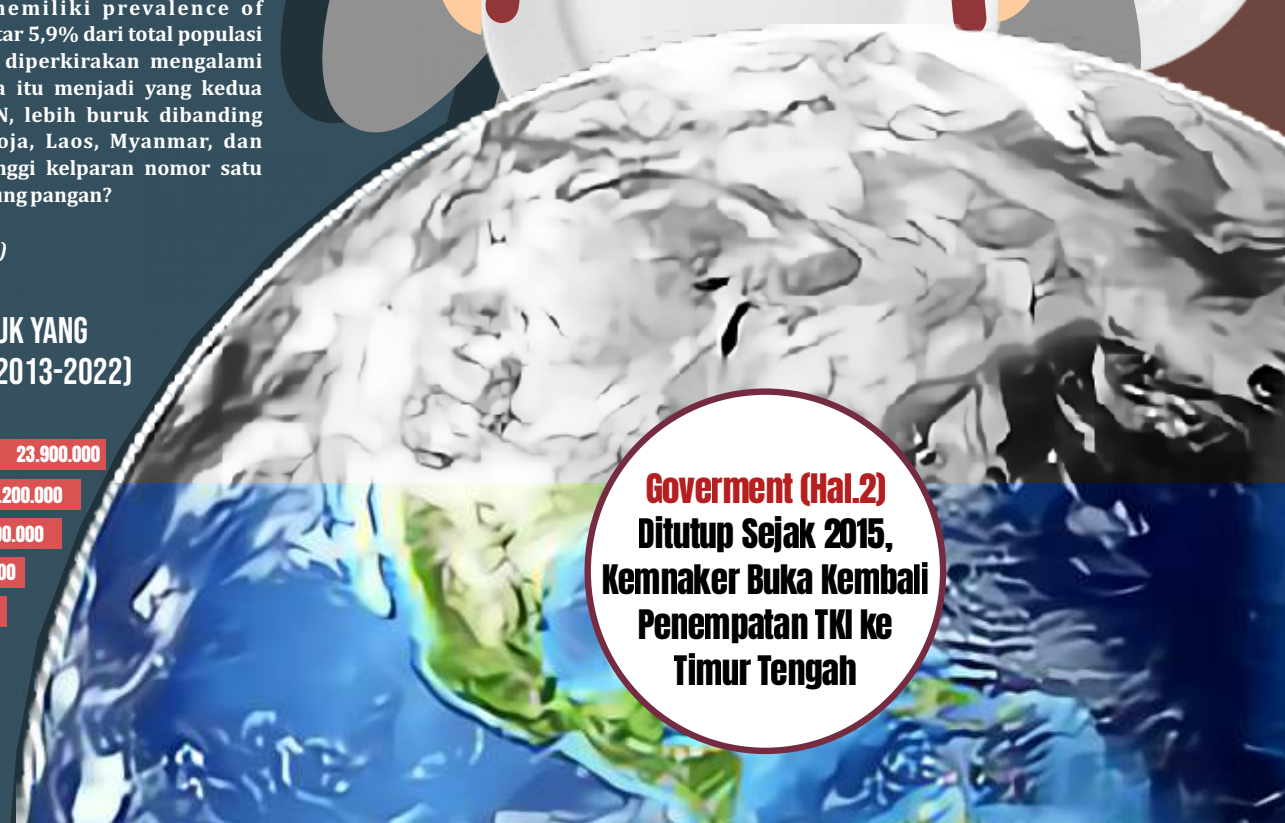
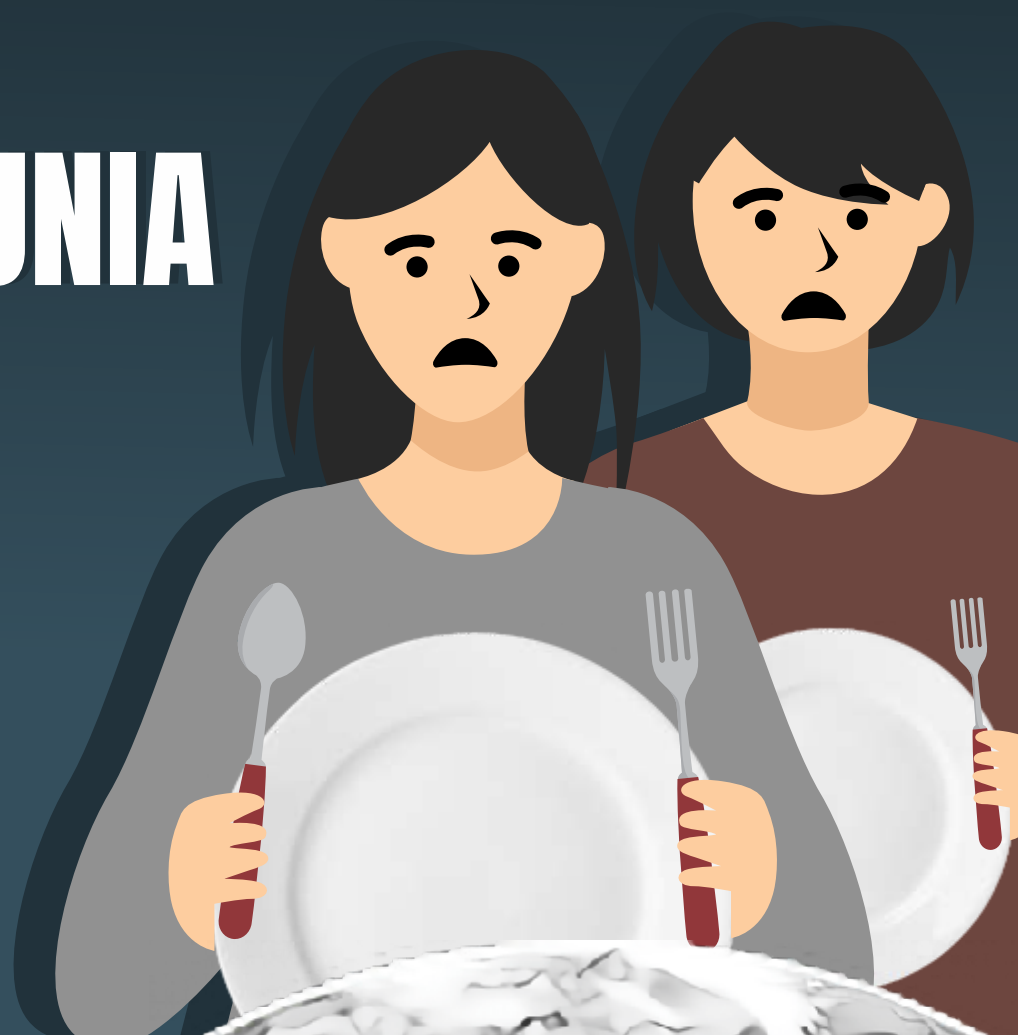
BMKG: SELURUH DUNIA TERANCAM KELAPARAN

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi perubahan iklim berpotensi menyebabkan bencana kelaparan di seluruh dunia pada 2050. Tak perlu menunggu 27 tahun lagi, di Indonesia masalah kelaparan saat ini sudah melanda dua wilayah Papua Tengah, yakni di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak. Diketahui, Organisasi pangan dunia (FAO) mengukur angka kelaparan berdasarkan prevalence of undernourishment, yakni data prevalensi kurang gizi atau ketidakcukupan konsumsi pangan dari setiap negara. Hasilnya, pada 2022 Indonesia tercatat memiliki prevalence of undernourishment 5,9%. Artinya, sekitar 5,9% dari total populasi Indonesia (sekitar 16,2 juta orang) diperkirakan mengalami kelaparan. Angka kelaparan Indonesia itu menjadi yang kedua tertinggi di kelompok negara ASEAN, lebih buruk dibanding Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Malaysia. Sementara prevalensi tertinggi kelaparan nomor satu berada di Timor Leste. Apa kabar lumbung pangan?

(Baca Hal 11)

JUMLAH DAN PREVALENSI PENDUDUK YANG ALAMI KELAPARAN DI INDONESIA (2013-2022)

Tahun	Prevalensi Kelaparan	Jumlah Orang
2013	9,6%	23.900.000
2014	8,4%	21.200.000
2015	7,9%	20.400.000
2016	7,3%	18.900.000
2017	6,7%	17.500.000
2018	6,0%	15.900.000
2019	5,9%	15.700.000
2020	6,0%	16.300.000
2021	6,1%	16.500.000
2022	5,9%	16.200.000



**Government (Hal.2)
Ditutup Sejak 2015,
Kemnaker Buka Kembali
Penempatan TKI ke
Timur Tengah**

Ditutup Sejak 2015, Kemnaker Buka Kembali Penempatan TKI ke Timur Tengah

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penataan ulang terkait tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola penempatan dan perlindungan PMI yang lebih baik.

Salah satu langkah besar yang diambil adalah mencabut tiga aturan. Pertama, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah. "Pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di negara-negara Kawasan Timur Tengah dengan merujuk proses penempatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8/2023).

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat yaitu negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Kedua, negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia. Dan terakhir negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. "Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Diketahui, pengiriman PMI ke Arab Saudi, khusus untuk sektor domestik seperti ART, sebelumnya dihentikan pada 2014. Imbas dari kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dialami pekerja domestik asal Indonesia di Arab, tanpa ada tindakan hukum dari pemerintah setempat.

Kedua, Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga, aturan yang akan dicabut



Aksi Migrant Watch dan Masyarakat Sipil di Kantor Kemnaker, Selasa (22/8/2023). (ist)

adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut. "Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Muncul Penolakan

Federasi Buruh Migran Nusantara (BUMINU) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU), menolak wacana tuntutan pembukaan moratorium pekerja sektor informal ke timur tengah atau negara jazirah arab. Ihwal adanya penolakan sikap tersebut, dikemukakan ketua umumnya, Ali Nurdin Abdulrahman.

"Moratorium ke Timur Tengah saat ini masih harus dipertahankan selama pemerintah di negara penempatan belum memberikan jaminan perlindungan melalui Perjanjian atau MoU. Apalagi masih banyak kasus lama yang masih belum tertangani dan ini menjadi salah satu alasan," kata Ali Nurdin dikutip Rabu (23/8/2023).

Menurut Ali, negara-negara Arab dengan sistem kafalah yang menganut budaya yang kental dengan perbudakan, walaupun tidak semua. Oleh karena itu, hal ini harus jadi pertimbangan untuk mempertahankan moratorium tersebut.

"Saya sangat mengetahui kondisi

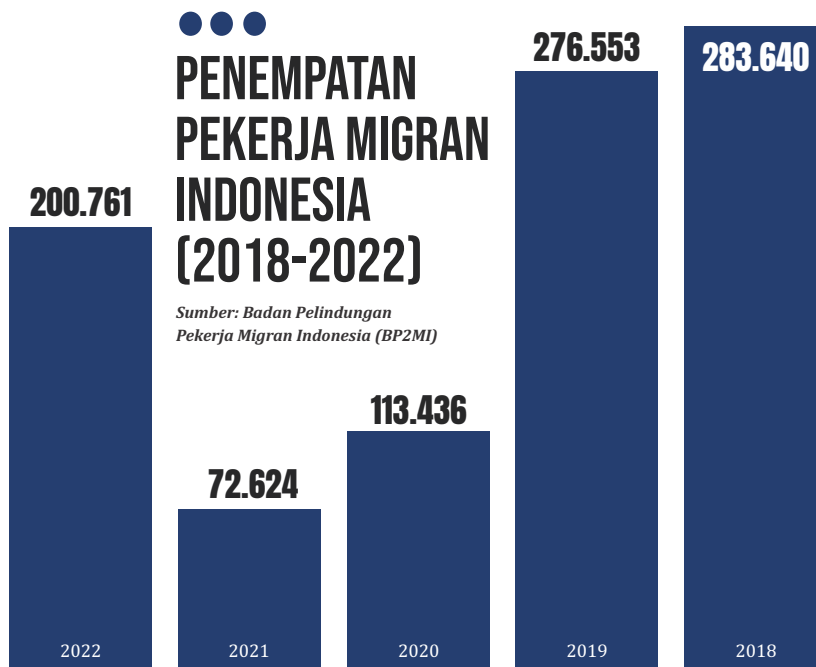
pekerja migran Indonesia, setidaknya naik derajat dibandingkan sistem lama," kata Ali.

Ali mengatakan, penempatan pekerja informal ke Timur tengah memang seperti berburu emas, sehingga banyak pihak yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, ketika moratorium pun masih banyak oknum P3MI oknum mafia penempatan yang masih memberangkatkannya secara non prosedural.

Akibatnya, ketika pemerintah gencar melakukan sidak dan penangkapan, maka banyak pihak yang merasa hilang pendapatannya, terutama para mafia dan yang tidak diikutsertakan dalam program SPSK. "Maka aksi pencabutan moratorium mulai didengungkan," tandas Ali.

Dikatakan Ali, soal perdebatan tentang SPSK, memang banyak pihak yang menolak. Ada juga menuduh monopoli. Namun sepengetahuannya, ini bagian dari perbaikan tata Kelola yang memang tidak semua P3MI bisa ikut. Hal ini karena memang banyak syarat dan kriteria yang bisa ikut serta bukan hanya aturan dari pemerintah Indonesia saja, tetapi aturan ketat dari pemerintah arab Saudi juga.

"Misalkan lolos syarat di Indonesia belum tentu lolos syarat yang ditetapkan pihak Arab Saudi, karena untuk ikut serta di program SPSK P3MI, tidak cukup hanya bermodal SIUP, tetapi berbagai hal harus dipenuhi mulai rekam jejak, komitmen dan tanggung jawab perlindungan dan banyak hal yang memang harus dipenuhi," jelasnya. Menurut Ali, hal ini justru baik sebagai salah satu cara dalam perbaikan tata kelola penempatan kerja, terutama ke Timur Tengah. (wid,rls,ant/dya)



Gaduh MK Izinkan Kampanye di Kampus dan Sekolah KPAI: Langgar Hak Anak yang Dijamin Konstitusi



Anggota KPU Kabupaten Badung didampingi maskot Pemilu 2024 Sura dan Sulu memberikan informasi terkait tahapan Pemilu 2024 kepada sejumlah pelajar di Badung, Bali, Senin (14/8/2023). (adnt)

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) mengetok putusan larangan titik kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Hal ini pun menuai pro dan kontra.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, sekolah seharusnya menjadi ruang publik yang netral tempat disemainya nilai-nilai kemanusiaan bagi semua siswa/murid tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi. "Sekolah harus bebas dari kepentingan politik personal/individual dan golongan. Segala bentuk kampanye politik di sekolah, khususnya dalam rangka Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, adalah penyalahgunaan ruang publik netral," ujar Komisioner KPAI Sylvana Apituley, melalui keterangannya pada Rabu (23/8/2023).

Diketahui, Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tidak melarang secara total kampanye politik oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye di tempat pendidikan, sebagaimana diberlakukan bagi tempat ibadah.

Sylvana menegaskan, putusan MK ini berpotensi melanggengkan dan memperluas kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional anak. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 pasal 28B ayat 2, negara mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ia khawatir, kampanye politik di sekolah menimbulkan manipulasi, eksploitasi, dan penyalahgunaan anak.

Konten kampanye politik, lanjutnya, bukan materi kampanye yang sesuai untuk dikonsumsi oleh

anak. Ia mengingatkan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

"Ancaman kekerasan yang melibatkan massa pendukung peserta pemilu/pilkada, juga adalah salah satu bahaya yang harus diwaspadai dapat terjadi pada saat kampanye dilaksanakan di sekolah," sebut Sylvana. "Berbagai bentuk materi kampanye yang tidak sesuai dan dapat merusak perkembangan emosi dan mental anak, berupa agitasi, propaganda, stigma dan hoaks yang mengadu domba tentang lawan politik, ajakan untuk mencurigai dan membenci, serta politisasi identitas yang dapat memperuncing disharmoni, akan membentuk persepsi, sikap dan perilaku sosial anak yang negatif pula," jelasnya.

Dampaknya, anak dikhawatirkan bakal melabel negatif orang lain yang ia identifikasi sebagai lawan politik, membenci, hingga melakukan kekerasan atas dasar "perbedaan pilihan politik".

Bahkan, tanpa pembolehan kampanye di sekolah sebagaimana putusan MK, KPAI menemukan bahwa dalam 10 tahun terakhir, terdapat sedikitnya 15 bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak selama masa kampanye hingga setelah pengumuman hasil pemilu.

Bentuk-bentuknya meliputi penyalahgunaan tempat penitipan anak, bujuk-rayu untuk kepentingan politik elektoral, hingga provokasi. KPAI mengaku telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) yang akan merevisi Peraturan KPU tentang Kampanye, agar beleid itu nantinya memperhatikan hak dan perlindungan anak.

Hal senada dikatakan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Dia menyebut wajar ada pro dan kontra. Namun harus ada tindak lanjut KPU soal pengaturan teknik dalam aturan ini.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno listiati mengungkapkan keprihatinan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di lembaga pendidikan. Retno mengatakan bahwa selama ini lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah dianggap sebagai ruang netral yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik elektoral, terutama dalam pemilihan umum.

"Semua pihak yang terlibat dalam Pemilu harus mengawasi pelaksanaan kampanye di lingkungan pendidikan. Bawaslu dan KPU juga harus mengawasi kampanye di lembaga pendidikan khususnya sekolah negeri," ungkapnya.

Sesuai Tema Pendidikan

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai putusan tersebut bisa disesuaikan secara objektif. Dengan kata lain, kampanye politik yang dilakukan di sekolah atau fasilitas serupa lainnya, pasti menyesuaikan dengan tema pendidikan.

"Memang kalau tidak kampanye di ruang publik, di ruang apa? Kan memang kampanye itu kan harus di ruang publik," kata Mahfud dalam konferensi pers hasil kerja Tim

Percepatan Reformasi Hukum di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

"Kalau di sekolah dan sebagainya, itu kampanyenya sesuai dengan pendidikan, yang objektif, akademis, dan sebagainya," tambahnya.

Mengutip pemberitaan Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera merevisi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. "Tentunya KPU akan menyesuaikan peraturan teknis KPU. Sebagaimana kita ketahui, putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Jadi nanti KPU akan melakukan perbaikan peraturan," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik, Jumat (18/8/2023).

Saat ini, KPU masih menyadur ketentuan kampanye di dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan tanpa syarat. Pasal itulah yang belakangan direvisi MK dalam putusannya. KPU akan melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan meminta masukan publik.

Setelah draf revisi rampung, sebagaimana prosedur perbaikan peraturan, KPU akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum mengundang revisinya. Namun, Idham belum bisa memberi kepastian kapan revisi itu akan dilakukan. (wid,rls,ist/dya)

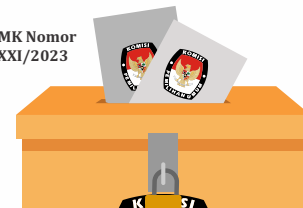
PUTUSAN MK SOAL KAMPANYE DI SEKOLAH

- Dalam perkara itu, dua orang pemohon, Handrey Mantiri dan Ong Yenni, menilai ada inkonsistensi aturan terkait aturan itu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Larangan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah tercantum tanpa syarat diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h. Namun, pada bagian Penjelasan, tercantum kelonggaran yang berbunyi, "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."

- Dalam amar putusannya, MK menyatakan, bagian Penjelasan itu tidak berkekuatan hukum mengikat karena menciptakan ambiguitas. Jika pengecualian itu diperlukan, maka seharusnya ia tidak diletakkan di bagian penjelasan. Sebagai gantinya, pengecualian itu dimasukkan ke norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, kecuali frasa "tempat ibadah". "Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapinya berbunyi, '(peserta pemilu dilarang, red.) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu,'" bunyi putusan itu. Hanya tempat ibadah yang tetap tidak diberikan pengecualian sebagai tempat kampanye meski atas undangan pengelola dan tanpa atribut kampanye.

Sumber:
Putusan MK Nomor
65/PUU-XXI/2023

•
•
•
•



Karnaval di Trenggalek Jadi Aksi Penolakan Tambang Emas

TRENGGALEK – Karnaval Agustusann di Trenggalek Nampak berbeda dengan karnaval di daerah lain. Jika di daerah lain banyak mengungkap tema-tema yang unik dan menarik, namun karnaval di Trenggalek lebih mirip aksi penolakan terhadap rencana pendirian tambang emas oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Trenggalek.

Karnaval bernuansa demo itu dilakukan di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Warga mengungkap banner dan poster yang berbunyi penolakan atas tambang emas tersebut. Diantaranya bertuliskan “POKO'E TOLAK...!!! TAMBANG EMAS PT. SMN RAKYAT BANGKIT MELAWAN...!!!,” sebagaimana tulisan dalam salah satu banner yang dibawa warga saat pawai kebudayaan, Selasa (22/8/2023) seperti yang diberitakan beritajatim.com.

Tidak kurang dari 400 warga Desa Dukuh yang berpartisipasi dalam pawai kebudayaan ini, turut mengutarakan penolakan terhadap rencana tambang emas PT SMN. Langkah ini diambil oleh warga sebagai upaya untuk menjaga alam Trenggalek, terutama di wilayah Desa Dukuh, dari potensi kerusakan akibat aktivitas tambang emas.

Ratman, Koordinator Tim Pawai Desa Dukuh, menjelaskan bahwa semangat peserta dalam mengikuti pawai tersebut sangat tinggi, karena mereka berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam.

“Kami memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat Watulimo mengenai bahaya tambang emas dan mengajak mereka untuk bersatu dalam menentang rencana tambang emas PT. SMN,” kata Ratman.

Lebih lanjut, warga Desa Dukuh meragukan janji-janji kesejahteraan yang diajukan oleh PT SMN jika tambang emas didirikan. Bagi mereka, kesejahteraan sudah bisa diperoleh melalui hasil alam yang sudah ada.

Keberisihan lingkungan yang berpotensi muncul akibat aktivitas tambang emas oleh PT SMN juga menjadi keprihatinan warga Desa Dukuh. Warga percaya bahwa jika lingkungan alam rusak, berbagai bencana juga akan mengikuti.

Ratman juga mengungkapkan insiden tanah longsor yang terjadi dekat lokasi pengeboran setelah PT SMN melakukan eksplorasi. “Efek lingkungan yang nyata adalah adanya semburan air saat pengeboran. Di sekitar area pengeboran, banyak pohon durian yang akarnya membusuk dan mati serta tumbang,” paparnya.

Bukan hanya itu, dampak buruk terhadap kehidupan sosial juga menjadi alasan utama warga Desa Dukuh menolak adanya tambang emas di Trenggalek. Hal ini merujuk pada



Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek ikuti pawai kebudayaan dengan poster penolakan tambang emas.

pengalaman warga yang menghadapi perpecahan pendapat antara pendukung dan penentang rencana tambang.

“Sehingga, harmoni yang selama ini terjaga hancur akibat dampak tambang ini. Beberapa warga merasa ketakutan, bahkan sampai sakit akibat perasaan cemas. Ada yang menunda pembangunan rumah karena takut, dan masih banyak dampak lainnya,” ungkap Ratman.

Oleh karena itu, Ratman menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi warga Desa Dukuh untuk tidak menolak rencana tambang emas oleh PT SMN di Trenggalek. Ia dengan semangat menyatakan, “Kami tetap menolak tambang emas!”

Ratman juga berharap pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mendengarkan suara warga kecil dan mencabut segala izin yang diberikan kepada PT SMN. Hal itu dilakukan demi melindungi alam dan keberlanjutan lingkungan Trenggalek. “Kami mohon agar suara kami didengar,” tandasnya.

Untuk diketahui, tambang emas oleh PT SMN ini akan eksploitasi 12 ribu hektare lebih, sehingga menjadikan pertambangan ini PT SMN sebagai tambang emas terbesar di Jawa. Izin yang diberikan kepada PT SMN untuk eksploitasi tambang emas, mencakup 9 dari 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Konsesi tambang emas dalam izin itu berada di kawasan rawan bencana, area perkebunan rakyat, hutan lindung, serta kawasan karst.

Izin tersebut bermula dari terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Trenggalek nomor 702/2005. Lewat SK Bupati itu, PT SMN mengantongi izin konsesi eksplorasi pertambangan seluas 17.586 hektare. Selanjutnya, pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan perpanjangan kuasa pertambangan wilayah eksplorasi PT SMN dan memperluasnya hingga mencapai

30.044 hektare. Luasan tersebut sangatlah di luar nalar akal sehat karena mencaplok seperempat luas keseluruhan wilayah Kabupaten Trenggalek.

Lima tahun kemudian, Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga membuat ketetapan baru dengan terbitnya Keputusan Bupati Trenggalek nomor 188.45/963/406.004/2012, yang mengubah luas areal pertambangan menjadi 29.969 hektare.

Tak ingin kampungnya mengalami kerusakan dan kebangkrutan secara sosial-ekologis oleh industri pertambangan, ribuan warga dari berbagai desa di sekitar kawasan konsesi mulai melakukan protes dan menggalang perlawanan. Pada tahun 2013, gerakan perlawanan warga tersebut berhasil menghentikan segala aktivitas pengambilan sampel dan kendaraan alat berat milik PT SMN.

Namun, seolah tak ingin mengubris tuntutan penolakan dan protes warga yang terus meluas, empat tahun kemudian, Dinas ESDM Jawa Timur menerbitkan rekomendasi teknis penambahan jangka waktu IUP (izin usaha pertambangan) melalui dokumen nomor 545/605/119.2/2016, tertanggal 29 Februari 2016, yang disusul dengan keluarnya Keputusan Gubernur Jatim nomor P2T/70/15.01.III/2016 tentang perubahan jangka waktu IUP PT SMN, tertanggal 22 Maret 2016 dan berlaku hingga 2018.

Saat ini diketahui, PT SMN mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi emas dan mineral pengikut (DMP) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor P2T/57/15.02/VI/2019. Dengan izin yang berlaku hingga 2029 tersebut, PT SMN mengantongi wilayah konsesi seluas 12.813,41 hektare yang tersebar di sembilan kecamatan, yakni Tugu, Karang, Suruh, Pule, Gandusari, Dongko, Kampak, Munjungan, dan Watulimo.

Untuk mencegah perluasan krisis

sosial-ekologis dari kehadiran industri pertambangan PT SMN di Trenggalek, Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dan WALHI Jawa Timur telah mendesak Pemerintah Kabupaten Trenggalek agar segera menerbitkan payung hukum dan berbagai langkah strategis guna peningkatan perlindungan dan penyelamatan ruang hidup pada tahun 2021.

Namun, usulan itu sepertinya terganjal oleh pemerintah pusat, karena surat permohonan Nur Arifin (Bupati Trenggalek) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) pada 18 Mei 2021 agar meninjau ulang IUP Operasi Produksi PT SMN berujung buntu. KESDM dalam surat tanggapannya, bernomor T-687/MB.04.DJB.M/2022, tertanggal 12 Februari 2022, menyatakan:

“Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sesuai kewenangannya memastikan PT SMN melakukan kegiatan pertambangan dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)...”.

Pada tanggal 8 Agustus 2022, Bupati Trenggalek juga kembali mengirimkan surat permohonan pembatalan IUP – Operasi Produksi PT SMN kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Adapun beberapa poin utama yang menjadi dasar permohonan pembatalan IUP PT SMN yang termaktub dalam surat yang dikirim oleh Bupati Trenggalek tersebut adalah:

a) Bahwa IUP PT SMN bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032,

b) Bahwa IUP PT SMN berada di kawasan lindung

c) Bahwa IUP PT SMN berada di kawasan rawan bencana,

d) Bahwa PT SMN tidak mematuhi kewajiban ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,

e) Bahwa IUP PT SMN berada di atas wilayah pemukiman penduduk dan lahan pertanian produktif milik masyarakat.

Namun, lagi-lagi pemerintah pusat – KESDM tampaknya tidak bergeming dan terkesan mengabaikan permohonan Bupati Trenggalek dan tuntutan warga yang akan terdampak oleh industri pertambangan PT SMN tersebut. (lut/dya)

Sebanyak 17 Daerah di Jatim dalam Status Darurat Kekeringan

SURABAYA - Sebanyak 17 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan status darurat kekeringan. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim berencana meminta bantuan BNPB untuk melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Sebelumnya, website dengan alamat situs dprd.bojonegorokab.go.id itu diretas pada Minggu (20/08/2023) dan sempat terjadi juga pada Jumat (26/05/2023). Website DPRD itu kini dinonaktifkan sementara karena Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro bersama pihak pengembang masih melakukan sejumlah pembenahan.

Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Kominfo Bojonegoro Sutrisno mengatakan, pihak pengembang saat ini masih melakukan pembenahan. Sehingga untuk sementara waktu menonaktifkan website DPRD hingga selesai dibenahi.

"Sudah dilakukan pen test [penetration testing]. Pihak pengembang website DPRD Bojonegoro membenahi dulu webnya. Untuk sementara [website] down dulu sampai selesai dibenahi," ujarnya, dikutip dari Selasa (22/08/2022).

Sutrisno menjelaskan bahwa untuk Data Center Pemkab Bojonegoro memiliki tiga server DNS (domain name system), yaitu dua server Bare Metal di Data Center Pemkab Bojonegoro dan satu server VM (Virtual Machine) di Data Center Telkom Sigma.

Terkait kasus peretasan tersebut, Sutrisno mengungkapkan bahwa untuk aplikasi website DPRD Bojonegoro, pihak Sekwan (Sekretariat DPRD Bojonegoro) melakukan pengadaan sendiri, dan pengelolaan website tersebut sepenuhnya dikelola oleh pihak Sekwan.

Sementara untuk hosting, menggunakan VM Server (Virtual Machine Server) yang disediakan oleh Kominfo. Termasuk create (pembuatan) sub domain (dprd.bojonegorokab.go.id), juga dilakukan oleh Kominfo. "Hanya hosting dan domain. Pengelolaan (website) ada si Sekwan," kata Sutrisno.

Sutrisno juga menjelaskan bahwa dalam kasus peretasan tersebut, banyak kemungkinan celah yang dapat dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh peretas. Bisa melalui kelemahan server, bisa melalui kelemahan aplikasi web, bisa melalui kelemahan jaringan, dan sebagainya.

Sementara untuk keamanan (security) jaringan Data Center Pemkab Bojonegoro dilindungi Appliance Firewall, dan sejauh ini, server-server yang dikelola Kominfo Bojonegoro masih relatif aman dari



Warga di Kabupaten Ngawi menempuh perjalanan kaki sejauh 2 km untuk mendapatkan air bersih.

peretasan. Server-server tersebut ditempatkan di zona aman dan secara periodik dilakukan update (patch security), baik dari sisi sistem operasi dan aplikasi pendukung.

"Sudah dipastikan oleh tim internal (Kominfo) tidak ada masalah dengan DNS server tersebut. Peretasan yang terjadi kali ini tidak ada hubungannya dengan DNS Server. Analisa awal tim internal, peretasan terjadi pada kelemahan scripting aplikasi web dan ini bukan pertama kalinya terjadi," ungkapnya.

Sementara salah satu web developer asal Bojonegoro Alifiansyah Mustafa mengatakan, untuk mengatasi peretasan tersebut, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengetahui sumber masalah peretasan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan penetration testing.

"Webapp (website aplikasi) harus dilakukan penetration testing agar diketahui celah-celahnya yang bocor di mana. Kalau sudah ada hasil auditnya, dibenahi webapp-nya berdasarkan hasil audit tersebut. Ini penangan jangka pendek, tapi kalau masih kejadian lagi, ya artinya celahnya bukan hanya di situ. Bisa jadi si peretas sudah menemukan celah lain," kata pria yang akrab disapa Ian.

Ian juga mengingatkan bahwa jika penanganan peretasan website tersebut tidak tuntas, maka masih ada kemungkinan website tersebut akan kembali diretas. "Kalau kemarin yang diserang tampilan muka situsnya (deface) diubah, artinya peretasnya bisa masuk sistem, dan peretas seperti ini masih meninggalkan backdoor di dalam server," pungkasnya.

Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kominfo) mengatakan sebanyak 50 persen website yang diretas menggunakan domain go.id atau yang selama ini digunakan untuk instansi pemerintah. Sedangkan 50 persen lainnya adalah website dengan domain umum, seperti .com, .net, .ac.id, or.id, atau .org.

Dinas kominfo Jatim, mengungkap ada beberapa alasan mengapa website pemerintah lebih banyak diserang. Salah satunya adalah karena ketidakpuasan atau ketidaksenangan seseorang terhadap pelayanan atau data yang ditampilkan di website milik pemerintah.

Itu memicu serangan terhadap website, sehingga situs milik pemerintah itu datanya dirusak dan jaringannya jadi terkunci. Namun, secara umum serangan hacker (perusak data situs web) berharap agar kinerja pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Dengan adanya banyak situs web pemerintah yang diserang, lanjut dia, maka perlu adanya pelatihan dan pembekalan bagi operator website pemerintah. Mereka harus diajari bertahan dari serangan hacker, tapi bukan menjadi penyerangnya.

Adapun beberapa contoh website pemerintah di Jatim kondisi diretas, yakni www.disnak-jatim.go.id, www.dinsos-jatim.go.id, www.banyuwangikab.go.id, www.blitar.imigrasi.go.id, www.kpid-jatimprov.go.id, www.dpkad.probolinggakab.go.id, www.pn-malang.go.id dan www.pkk.banyuwangikab.go.id.

Selain melalui website, kerusakan data juga sering ada dari akses jaringan internet WiFi. Dari hasil monitoring data Kementerian Kominfo pada Februari 2012 lalu, di

Surabaya dari sekitar 600 jaringan WiFi, 400 jaringan di antaranya tidak dikunci (tak gunakan user id dan password). Sehingga, dengan potensi jaringan WiFi insecure (tak terkunci) itu, maka potensi perusakan dan penyerangan data dapat juga dilakukan oleh hacker.

Menyikapi hal tersebut, di era global saat ini keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan. Ini karena jaringan komputer dan internet yang mudah diserang itu sifatnya global dan tidak aman. Saat data terkirim dari satu komputer ke komputer lain akan memberi kesempatan pada user internet lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut.

Untuk itulah, perlu adanya keamanan sistem informasi data global yang sifatnya komprehensif. Sebab tidak ada satupun sistem komputer yang bisa diamankan 100 persen. Akan tetapi yang dilakukan adalah hanya bisa mencegah dan mempersulit pihak lain yang hendak mengganggu sistem yang ada. (lut/dya)



Ada kurang lebih 17 wilayah sekarang yang sudah mengeluarkan status (darurat kekeringan)"

GATOT SOEBROTO

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim



RAHMANIA ASTRINI

Jadi Penyanyi Pembuka Konser Coldplay



Foto-Foto : Berbagai Sumber

PENYANYI pendatang baru, Rahmania Astrini (22), akan menjadi penyanyi pembuka konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 15 November 2023.

Namun, sebelum menuju panggung besarnya di GBK, Astrini akan lebih dulu tampil di Forestra 2023, orkestra musik hutan yang dikomandoi Erwin Gutawa di Orchid Forest Cikole, Lembang, Jawa Barat, pada Sabtu (26/8/2023).

"Deg-degan karena ini sesuatu yang dari dulu udah aku bayangin. Kira-kira bisa enggak, ya, kalau nanti manggung dengan musik orkestra karena musik orkestra itu punya kompleksitasnya sendiri sekaligus cantik banget," ungkap Astrini seusai menghadiri jumpa pers.

Meski deg-degan, Astrini merasa sangat tertantang. Dia berjanji akan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin agar bisa memberikan suguhan yang magical.

Selain Astrini, ada juga Aurelie, Barasuara, Burgerkill, David Bayu, Feelkoplo, Gabber Modus Operandi, White Shoes and The Couples Company, dan Sore. Mereka akan tampil diiringi musik orkestra di panggung yang didesain dengan konsep melayang oleh Jay Subyakto.

Terpisah, tentang penampilannya sebagai penyanyi pembuka di konser Coldplay, Astrini merasa sangat bersyukur karena secara pribadi dia pun tak menyangka bisa mendapatkan kesempatan itu. Soal keberatan penggemar Coldplay karena dia dinilai belum terlalu dikenal, Astrini menganggap hal itu wajar saja.

Astrini juga meng-cover lagu-lagu milik Coldplay. Salah satu lagu favoritnya adalah "Fix You". Saat ini, Astrini terus sibuk melatih fisik dan vokalnya agar kelak bisa "menguasai" venue GBK yang besar.

Rahmania Astrini meniti karier bermusik sejak SD dengan membawakan lagu I'm Not The Only One dari Sam Smith.

Salah satu penghargaan tinggi yang pernah ia terima adalah Anugerah Musik Indonesia tahun 2019 silam.

Rahmania Astrini Purwono lahir di Massachusetts pada 4 Juli 2001 dari pasangan Purwono dan Nyanya. Dari informasi yang beredar, Astri adalah anak ketiga dan memiliki kakak bernama Raden Otto Ajiputra Pruwono dan Rr. Putri Amaristya Purwono.

Ia pernah menempuh pendidikan di SD dan SMP Pribadi Bilingual School Bandung (2007-2016). Kemudian ia masuk ke SMA Negeri 5 Bandung (2016-2019).

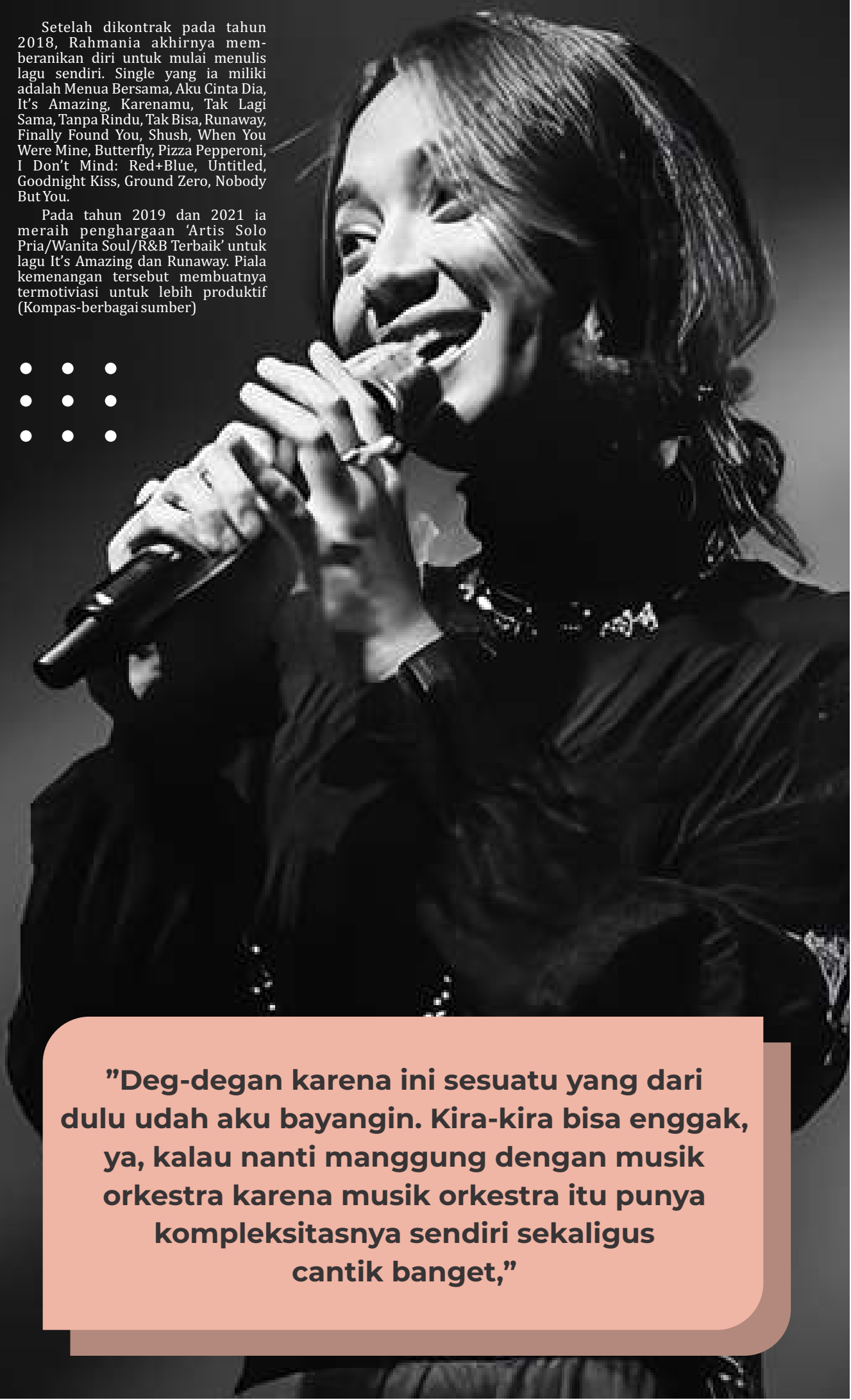
Saat ini ia sedang berkuliah di Universitas Bina Nusantara di jurusan S-1 Ilmu Komunikasi.

Astri saat itu mendapat tawaran dari label tapi nyaris ditolak. Beruntung ibu Astri sigap dan memintanya memikirkan ulang karier sebagai musisi.

Label tersebut mengetahui sosok Astri gara-gara ia sering membawakan cover lagu di Instagram dan juga YouTube, "Lagu yang bikin aku di-notice, kayaknya waktu itu aku nyanyi Pillow Talk-nya dari Zayn Malik. Karena waktu itu video aku di-repost sama Indo Musikgram."

Setelah dikontrak pada tahun 2018, Rahmania akhirnya memberanikan diri untuk mulai menulis lagu sendiri. Single yang ia miliki adalah Menua Bersama, Aku Cinta Dia, It's Amazing, Karenamu, Tak Lagi Sama, Tanpa Rindu, Tak Bisa, Runaway, Finally Found You, Shush, When You Were Mine, Butterfly, Pizza Pepperoni, I Don't Mind: Red+Blue, Untitled, Goodnight Kiss, Ground Zero, Nobody But You.

Pada tahun 2019 dan 2021 ia meraih penghargaan 'Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik' untuk lagu It's Amazing dan Runaway. Piala kemenangan tersebut membuatnya termotivasi untuk lebih produktif (Kompas-berbagaisumber)



"Deg-degan karena ini sesuatu yang dari dulu udah aku bayangin. Kira-kira bisa enggak, ya, kalau nanti manggung dengan musik orkestra karena musik orkestra itu punya kompleksitasnya sendiri sekaligus cantik banget,"

EFEK MENAHANAN BERSIN YANG PERLU DIKETAHUI

SAAT anda merasa ingin bersin biasanya anda refleks akan menutup mulut atau menahannya agar tidak menyebar virus. Namun, menahan bersin ternyata dapat menyebabkan masalah yang lebih berbahaya.

Disiarkan laman Medical Daily, bersin adalah mekanisme alami tubuh untuk menghilangkan iritasi di hidung dan membersihkan saluran dari bakteri dan virus.

Bersin adalah salah satu gejala flu yang paling umum. Bisa juga dipicu oleh polutan, kuman, debu, serbuk sari atau bulu binatang.

Saat iritasi masuk ke hidung, sinyal listrik dikirim ke otak yang mengatakan bahwa hidung perlu dibersihkan sendiri.

Dalam sepersekian detik, tubuh langsung bertindak dan mempersiapkan diri untuk bersin.

Otot-otot menegang, lidah bergerak ke langit-langit mulut dan mata tertutup sebagai respons terhadap sinyal. Menahan bersin meningkatkan tekanan di dalam sistem pernapasan sekitar lima sampai 24 kali lebih banyak daripada tekanan yang disebabkan oleh bersin.

Jika menahan bersin, hal ini dapat menyebabkan gendang telinga pecah dan menyebabkan kehilangan pendengaran.

Kedua, menahan bersin juga dapat mengalihkan bakteri yang perlu dikeluarkan kembali ke telinga dan menyebabkan infeksi telinga tengah yang menyakitkan.

Ketiga, peningkatan tekanan akibat bersin yang tertahan dapat menyebabkan kerusakan ke rusakan dan pecahnya pembuluh darah di mata, hidung, atau gendang telinga.

Selebihnya bisa menyebabkan kerusakan otak, kerusakan tulang rusuk, tenggorokan dan diafragma.

Sementara itu, ada beberapa fakta menarik seputar bersin, diantaranya Anda tidak dapat bersin saat tidur, sinar matahari atau cahaya terang juga bisa memicu bersin.

Dalam sekali bersin akan mengeluarkan 100.000 kuman ke udara dengan kecepatan hingga 100 mil per jam. Berikut ini bahaya menahan bersin lainnya:

1. Infeksi

Mengidap infeksi menjadi bahaya menahan bersin selanjutnya. Bersin pada dasarnya menjadi upaya tubuh untuk membersihkan hidung dari berbagai benda asing, seperti bakteri dan virus. Jika ditahan, bakteri atau virus penyebab penyakit akan berdiam di dalam hidung, dan memicu sejumlah gangguan kesehatan salah satunya infeksi.

2. Cedera

Cedera di bagian hidung, mata, atau gendang telinga juga bisa menjadi bahaya menahan bersin. Hal tersebut dikarenakan, meningkatnya tekanan udara di dalam rongga wajah, sehingga

• • • •
• • • •

membuat pembuluh darah kecil di area tersebut berisiko pecah. Jika dilihat dari gejala fisik, cedera menimbulkan ciri khas berupa bintik merah pada mata, mimisan, atau darah yang keluar dari dalam telinga.

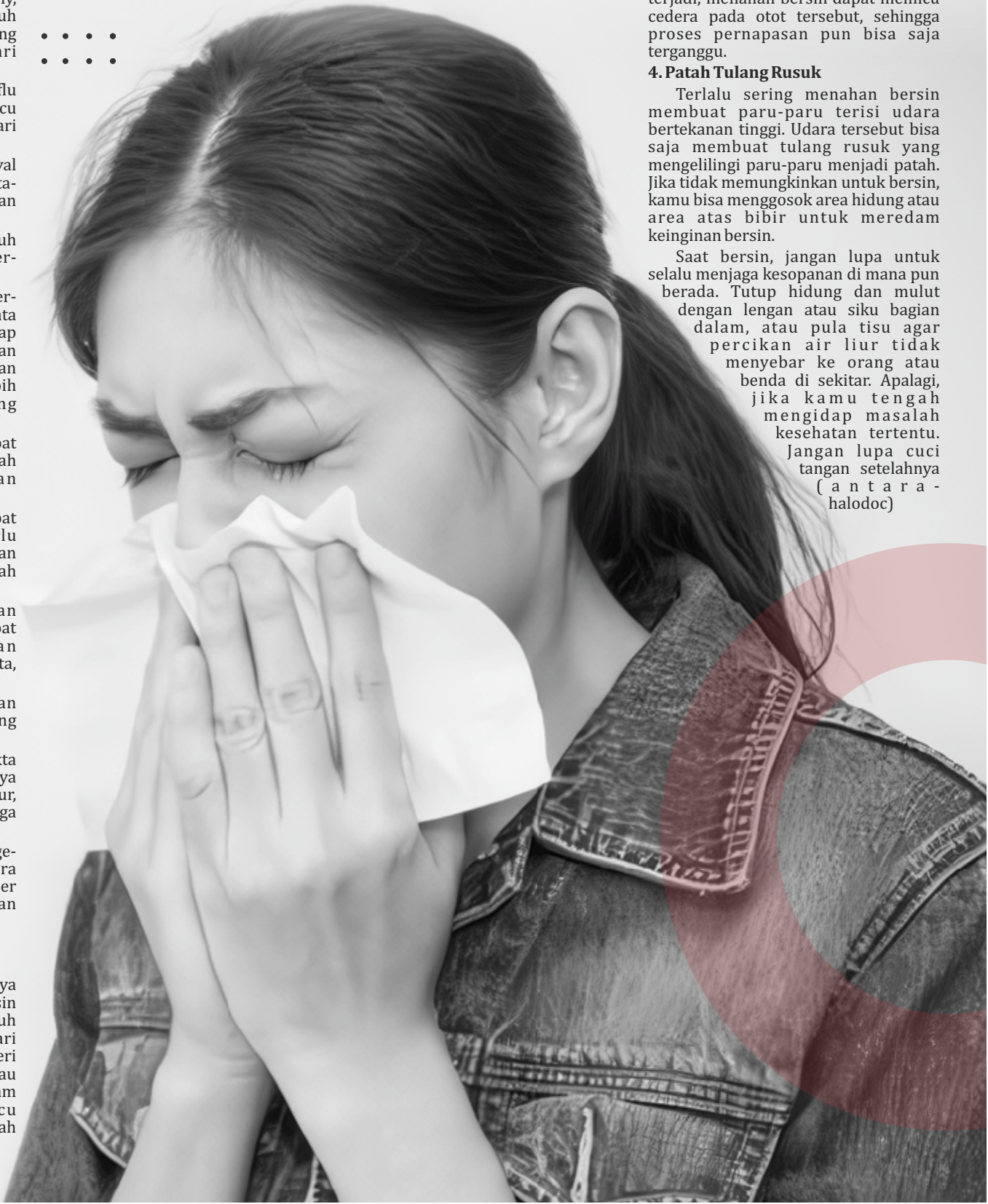
3. Cedera diafragma

Diafragma adalah otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Otot tersebut memiliki peran penting dalam proses pernapasan, muntah, batuk, dan bersin. Meski sangat jarang terjadi, menahan bersin dapat memicu cedera pada otot tersebut, sehingga proses pernapasan pun bisa saja terganggu.

4. Patah Tulang Rusuk

Terlalu sering menahan bersin membuat paru-paru terisi udara bertekanan tinggi. Udara tersebut bisa saja membuat tulang rusuk yang mengelilingi paru-paru menjadi patah. Jika tidak memungkinkan untuk bersin, kamu bisa menggosok area hidung atau area atas bibir untuk meredakan keinginan bersin.

Saat bersin, jangan lupa untuk selalu menjaga kesopanan di mana pun berada. Tutup hidung dan mulut dengan lengan atau siku bagian dalam, atau pula tisu agar percikan air liur tidak menyebar ke orang atau benda di sekitar. Apalagi, jika kamu tengah mengidap masalah kesehatan tertentu. Jangan lupa cuci tangan setelahnya (a n t a r a - halodoc)



6 ORANG TURIS MELUNCUR KE LUAR ANGKASA DENGAN VIRGIN GALACTIC



VIRGIN Galactic akhirnya meluncurkan penumpang wisata pertamanya ke luar angkasa, setelah penantian selama hampir dua dekade.

Tiga penumpang itu yakni Jon Goodwin, Keisha Schahaff, dan putri remajanya Anastatia Mayers melayang bebas gravitasi melalui pesawat ruang angkasa Virgin sekitar 45 menit setelah lepas landas.

Video langsung menunjukkan tiga pemandangan Bumi dan luar angkasa yang mengagumkan melalui jendela.

Setelah beberapa menit di luar angkasa, pesawat itu mulai turun dan mendarat dengan aman di negara bagian New Mexico, AS, di landasan yang sama tempat pesawat itu lepas landas.

Penerbangan hari Kamis lalu itu telah lama ditunggu adalah puncak dari janji hampir dua dekade oleh miliarder Inggris Richard Branson, pendiri Virgin Galactic, untuk membawa turis ke luar angkasa.

Penerbangan luar angkasa melibatkan pesawat pengangkut badan pesawat raksasa yang lepas landas dari landasan pacu, menambah ketinggian, lalu menjatuhkan pesawat luar angkasa bertenaga roket yang terbang lebih tinggi.

Misi yang diberi nama Galactic 02 ini merupakan penerbangan komersial kedua perusahaan tersebut.

Yang pertama pada akhir Juni membawa sekelompok perwira senior Angkatan Udara Italia yang telah

melakukan beberapa eksperimen di atas kapal, bukannya warga sipil yang melakukan perjalanan itu semata-mata untuk kesenangan.

Misi, Galactic 02, lepas landas tak lama setelah pukul 11.00 ET dari Spaceport America di New Mexico. Ada enam orang di dalam pesawat ruang angkasa, termasuk komandan pesawat luar angkasa dan mantan astronot NASA CJ Sturckow, pilot Kelly Latimer, dan Beth Moses, kepala instruktur astronot Virgin Galactic, yang melatih kru sebelum penerbangan.

Pesawat ruang angkasa itu juga membawa tiga penumpang pribadi, termasuk pelatih kesehatan dan kebugaran Keisha Schahaff dan putrinya yang berusia 18 tahun, Anastasia Mayers.

Sesuai laporan, Schahaff berhasil memenangkan kursi untuknya selama kompetisi penggalangan dana oleh

Space for Humanity, sebuah organisasi nirlaba yang ingin mendemokratisasi perjalanan luar angkasa.

Adapun Mayers, dia belajar filsafat dan fisika di Universitas Aberdeen di Skotlandia. Sangat menarik untuk dicatat bahwa Schahaff dan Mayers adalah duo ibu-anak pertama yang menjelajah ke luar angkasa bersama.

Misi tersebut juga menandai jumlah wanita terbanyak yang terbang dalam satu misi ke luar angkasa. Pesawat ruang angkasa itu juga membawa mantan Olympian Jon Goodwin, yang berpartisipasi dalam Olimpiade 1972 di Munich sebagai pemain kano.

Ini adalah fakta menarik lainnya untuk dicatat bahwa pada usia 80 tahun, Goodwin adalah penumpang kedua dengan penyakit Parkinson dan Olympian pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa.

Mengenai pesawat ruang angkasa, Galactic 02 adalah penerbangan suborbital, dan meskipun VSS Unity tidak mencapai orbit, lintasannya me--mungkinkan para pelancong mengalami beberapa menit tanpa bobot di ketinggian yang cukup tinggi bagi mereka untuk melihat kelengkungan Bumi (bisnis)



VIRGIN GALACTIC

HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

TERIMA TELEPON SAMBIL BERJALAN, WASPADA RISIKO KANKER

ANDA pasti pernah berjalan sambil menerima telepon baik dari teman ataupun klien.

"Kegiatan ini menghadirkan wastra. Biasanya, berjalan sambil menelepon ini kadang tidak kita sadari karena asyik ngobrol dengan orang lain.

Ternyata, telepon sambil berjalan dapat secara tidak sengaja berkontribusi terhadap peningkatan risiko kanker.

Alasannya, dikutip dari Times of India, karena saat kita bergerak, ponsel kita terus mencari dan terhubung ke sinyal, menghasilkan emisi radiasi dengan tingkat yang lebih tinggi.

Paparan radiasi yang berkepanjangan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi implikasi kesehatan.

Dr. Mandeep Singh Malhotra, Onkologi, CK Birla Hospital (R), Delhi mengatakan, ponsel memancarkan radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang frekuensi radio, dan paparan gelombang ini dalam waktu lama, terutama saat didekatkan ke tubuh, telah dikaitkan dengan potensi risiko kesehatan, termasuk kanker.

Penelitian yang sedang berlangsung menggali korelasi antara penggunaan ponsel dan perkembangan tumor otak, khususnya glioma dan neuroma akustik. Meskipun bukti tetap tidak meyakinkan, beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan hubungan, terutama

dengan penggunaan jangka panjang dan berat."

Namun, bukan hanya kanker saja yang harus kita waspadai. Terlibat dalam percakapan telepon atau SMS sambil berjalan mengalihkan perhatian dari sekitar kita, meningkatkan risiko kecelakaan, jatuh, dan tabrakan.

Selain itu, menatap layar ponsel dalam waktu lama berkontribusi pada ketegangan mata digital, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan sakit kepala.

Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar ponsel mengganggu produksi melatonin, hormon penting untuk tidur yang sehat.

Akibatnya, menggunakan ponsel sebelum tidur dapat menyebabkan gangguan tidur dan insomnia. Implikasinya melampaui individu untuk generasi muda kita.

Anak-anak dan remaja, dengan otak dan tubuh mereka yang sedang berkembang, lebih rentan terhadap potensi efek radiasi.

Dampak jangka panjang dari penggunaan ponsel secara ekstensif pada demografis ini masih dipelajari.

Sementara konsensus ilmiah belum secara definitif menetapkan hubungan antara radiasi ponsel dan efek kesehatan yang merugikan, sebaiknya berhati-hati.

Badan Internasional untuk Penelitian Kanker (IARC) mengklasifikasikan medan elektromagnetik

frekuensi radio sebagai "kemungkinan karsinogenik bagi manusia," berdasarkan bukti terbatas dari hubungan potensial dengan tumor otak.

Kebiasaan penggunaan telepon, pakai hands free dan menjaga jarak dengan ponsel dapat membantu mengurangi risiko.

Mengutip halodoc, dari American Cancer Society, ponsel menggunakan radiofrequency radiation untuk bekerja. Radiofrequency radiation merupakan salah satu jenis radiasi non-ionisasi.

Radiasi jenis ini tidak memiliki cukup energi untuk melepaskan elektron dari atom. Radiofrequency radiation memiliki jenis radiasi yang paling rendah dibandingkan jenis radiasi yang lain.

Jika radiasi ini terpapar langsung pada tubuh, maka dapat meningkatkan suhu tubuh. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan.

Namun, radiasi yang muncul tidak dapat cukup energi untuk merusak jaringan DNA yang ada dalam tubuh. Untuk itu, kondisi ini sangat jelas bahwa radiasi ponsel tidak dapat mengakibatkan penyakit kanker.

Namun, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa paparan radiofrequency radiation dapat meningkatkan munculnya tumor, meskipun penelitian ini masih terus diuji kebenarannya (berbagai sumber)



BMKG: Seluruh.... (dari hal 1)

KEPALA BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim semakin nyata di seluruh dunia. "Kerentanan pangan ini tidak lepas dari kenaikan suhu global yang akhirnya memberikan tekanan tambahan pada sumber daya air sehingga menghasilkan water hotspot atau krisis air," katanya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (23/8/2023).

Diketahui, FOA bahkan meramalkan 500 juta petani skala kecil yang menyuplai 80% stok pangan dunia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Akibatnya ancaman gagal panen dan penurunan produksi sangat mungkin terjadi.

Dwikorita memaparkan, seluruh negara di dunia saat ini mengalami dampak perubahan iklim dengan tingkat yang berbeda-beda. Permasalahannya beragam mulai dari cuaca ekstrem, bencana alam, penurunan keanekaragaman hayati, penurunan muka air laut, krisis air, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, lanjut Dwikorita, tren suhu rata-rata tahunan periode 1951-2021 mengalami peningkatan temperatur 0,15 derajat celsius per 10 tahun. Ini menandakan fenomena peningkatan suhu permukaan bahkan telah terjadi pula secara signifikan dan merata di Indonesia.

Pemanasan global, dikatakannya memicu pergeseran pola musim dan suhu udara yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Salah satunya adalah kejadian kekeringan akibat dipicu oleh El Nino seperti saat ini, bahkan diperparah dengan ulah manusia yang berujung pada kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya, dapat memicu semakin meningkatnya emisi karbon dan partikulat ke udara.

"Ancaman krisis pangan di pertengahan abad ini perlu menjadi perhatian bersama," katanya.

Tidak hanya berdampak pada produk pertanian, perubahan iklim juga membuat sejumlah wilayah di Indonesia terendam permanen akibat kenaikan muka air laut. Menteri

Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan salah satu kota yang mulai terendam yakni Pekalongan di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB), rata-rata penurunan tanah di Pekalongan mencapai 10 cm-20 cm per tahun. Ia menyebut perubahan iklim berdampak sangat signifikan terhadap wilayah pesisir Indonesia. "Kenaikan muka air laut akan berkisar antara 0,8-1,2 cm per tahun dan sudah mulai banyak wilayah di Indonesia yang tergenang dan terendam secara permanen," katanya.

Lambung Pangan untuk Papua

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menaruh perhatian terhadap bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan TNI untuk membuat lambung pangan, sebagai solusi.

Staf Ahli Bidang Stabilitas Politik dan Pemerintahan di Kementerian Koordinator Bidang PMK, Sorni Paskah Daeli, mengatakan bencana kelaparan di Kabupaten Puncak diakibatkan karena gagal panen akibat cuaca ekstrem.

"Bulan Mei sampai dengan Agustus sekitar 3 bulanan untuk membuat tanaman di sana tidak tumbuh itu membuat kemudian hasil-hasil pertanian tidak bisa digunakan," kata Sorni di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Kemenko PMK akan menggandeng TNI untuk mengamankan logistik lambung pangan di wilayah tersebut karena di sekitarnya rawan ancaman KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). "Permasalahannya kemudian adalah faktor keamanan. Oleh sebab itu maka ke depan dalam jangka pendek, tentara atau TNI diberikan satu wewenang untuk membuat komando statis di sana," ucapnya.

"Karena lembah di mana tempat masyarakat Papua yang terjadi kelaparan ada maka ditempatkan tentara karena di sekitarnya itu adalah markas-markas dari KKB," sambungnya.

Selain itu, pemerintah juga akan

membuat landasan yang lebih banyak karena medan yang cukup sulit untuk mengantarkan logistik ke wilayah-wilayah di Kabupaten Pegunungan. Pemerintah juga akan melibatkan masyarakat lokal dalam program ini.

"Memberdayakan Babinsa dari unsur masyarakat lokal jadi ada hubungan yang lebih baik antara masyarakat di sana supaya untuk antisipasi keamanan," ungkapnya.

Terpisah Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku telah menyiapkan skema penanganan kelaparan yang terjadi di tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. "Sekarang semua proses terus dilakukan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," kata usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantornya Jalan Merdeka Barat no 3, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Skema jangka pendek yang dilakukan pemerintah yakni memastikan kebutuhan pangan, obat-obatan dan pelayanan dasar lainnya untuk di distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Semua kebutuhan dasar itu dipastikan Muhadjir untuk mencukupi kebutuhan selama tiga bulan ke depan

Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah telah mendistribusikan ribuan ton kebutuhan pokok. Untuk stok bahan pangan ditempatkan di Distrik Sinak yang dekat dengan Distrik Agandugume. "Termasuk penanganan ibu hamil, menyusui, dan balita, untuk tiga bulan ke depan terpenuhi. Untuk pangan tidak ada masalah untuk tiga bulan ke depan sampai pulihnya kondisi pertanian di tiga distrik," katanya.

Sementara itu skema jangka menengah pemerintah akan menyiapkan dan membangun lambung pangan di Distrik Agandugume, termasuk pembuatan jalan dari Distrik Sinak ke Agandugume.

Jalur darat dari Distrik Agandugume ke Sinak memerlukan waktu tempuh sekitar dua hari satu malam. Sementara jalur udara tidak memungkinkan karena lintasan yang terlalu pendek dan hanya dua pilot saja yang bisa terbang ke Bandara Agandugume.

"Paling tidak kendaraan roda dua itu bisa mulus dari Sinak ke

Agandugume, sehingga suplai barang tidak diangkut lagi dengan jalan kaki, syukur-syukur roda empat (bisa masuk)," katanya.

Pemerintah juga akan memperpanjang landasan pacu di Bandara Sinak menjadi 1600 meter dari semula 1200 meter. Saat ini Bandara Sinak hanya bisa digunakan untuk pesawat jenis Caravan dan Twin Otter.

Skema jangka panjang pemerintah akan melakukan penguatan keterlibatan masyarakat, pemenuhan tenaga kesehatan dan biaya afirmasi Papua. "Sebetulnya dari Kemenkes ada melalui LPDP, sehingga kekurangan tenaga kesehatan bisa dipenuhi oleh putra-putri asli Papua. Tidak mungkin kita mengangkat mereka yang di luar (Papua). Sudah kita siapkan anggaran melalui LPDP," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat khusus membahas kelaparan di Papua Tengah. Rapat dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Wakapolri Komjen Agus Andrianto.

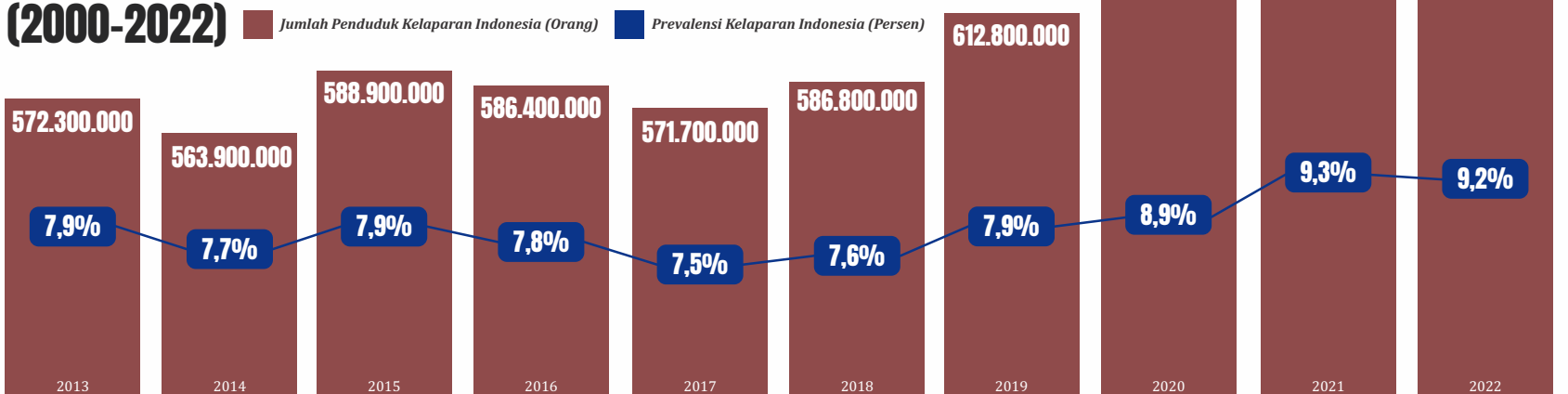
Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah menetapkan masa tanggap darurat selama satu minggu di Papua Tengah. Namun, pihaknya akan memperpanjang masa tanggap darurat menjadi dua minggu.

"Kami sepakat ini akan ditambah. Kami sepakat ditambah menjadi 2 minggu. Nanti kami evaluasi lagi," kata Ma'ruf di Kediaman Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), angka kelaparan di Indonesia sudah berkurang signifikan dalam dua dekade terakhir. FAO mengestimasi pada 2002 ada sekitar 41,2 juta orang atau 19% penduduk Indonesia yang mengalami kelaparan. Kemudian pada 2022 jumlahnya turun menjadi 16,2 juta orang atau 5,9% dari total populasi nasional.

Kendati ada perbaikan, prevalensi atau persentase penduduk yang kelaparan di Indonesia masih tergolong tinggi di skala Asia Tenggara. Berdasarkan data FAO, pada 2022 persentase penduduk kelaparan di Malaysia hanya 2,7% dan Myanmar 3,8%. (wid,rls,ist,kum/dya)

JUMLAH DAN PREVALENSI PENDUDUK YANG MENGALAMI KELAPARAN DI SKALA GLOBAL MENURUT ESTIMASI FAO (2000-2022)



Sebut Tangkapan 100 Kg Sabu di Jatim Tak Diungkap Polisi-BNN Bantah Anggota DPR Sahroni

SURABAYA-Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengungkap ada 100 kg sabu yang ditangkap di Jawa Timur (Jatim) tapi tak diungkap ke publik. Polda Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kompak membantah tudingan itu.

Diketahui Sahroni di akun Instagramnya @ahmadsahroni88 mention Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden Jokowi, hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Dia meminta penjelasan terkait informasi penangkapan sabu-sabu. Dia mengaku mendengar narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditangkap sebanyak 100 kg. Namun, dia heran mengapa hingga kini tak ada pemberitaan soal penangkapan sabu-sabu 100 kg itu.

"Saya dengar ada penangkapan sabu-sabu 100 kg di Jawa Timur tapi kok ga ada beritanya yah?? @JOKOWI @BEACUKAIRI @KEJAKSAAN.RI @LISTYOSIGITPRABOWO. Sekarang saya dengar malah keluar masuk kontainer dihambat. Apa benar demikian kah??," tulis unggahan di akun Instagram pribadinya @ahmadsahroni88, Rabu (23/8/2023).

Sahroni juga menulis jika informasi yang diperolehnya itu benar dan tidak dibuka secara transparan, maka patut diduga ada permainan. "Ini berita kalau sampai benar tapi enggak terbuka secara transparan sih diduga benar-benar ada permainan nih, @listyosigitprabowo pak kaplri mohon perhatian khusus tentang ini pak," tulis Sahroni. @jokowi pak presiden Dwiling time di Jawa Timur terhambat Pak presiden. @mohmahfudmd pak menko Izin ini ada dugaan permainan penangkapan narkoba yang enggak terekapose di Jawa Timur, mohon perhatian bapak Menko..." sambungnya.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, mengatakan bahwa memang ada penangkapan sabu seberat 100 kg di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Nganjuk pada bulan Mei 2023 lalu.

Akan tetapi, yang mengungkap kasus tersebut ialah dari pihak Badan



Narkotika Nasional (BNN) pusat.

"Apa yang disampaikan itu tidak benar. Jadi yang benar setelah kami cek adalah bahwa beberapa bulan yang lalu tepatnya sekitar bulan Mei bahwa Badan Narkotika Nasional menangkap sabu seberat 100 kg di wilayah Polres Nganjuk dan sekitarnya. Dan penangkapan itu sudah dirilis oleh BNN. Sehingga kami pastikan lagi bahwa berita itu tidak benar," ujar Dirmanto di Polda Jatim, Rabu (23/8/2023).

Dirmanto juga berpesan agar bijak dalam menggunakan sosial media dan tidak menyebarkan berita bohong. "Dan kami mengimbau kepada masyarakat marilah kita ciptakan situasi dan kondisi di ruang digital itu situasi yang nyaman. Ruang-ruang digital itu mari kita hiasi dengan informasi yang menarik, informasi yang mendidik, bukan malah membuat informasi ini tidak benar," ungkapnya.

Ditanya soal apakah Polda Jatim akan melakukan langkah hukum terkait postingan Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, Dirmanto mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami lebih lanjut. "Ya kami nanti masih

pelajari bagaimana terkait dengan postingan tersebut," tandasnya.

BNN: Kasus Lama, Sudah Publikasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) merespons unggahan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang menyorot ihwal penangkapan sabu 100 kilogram di Jawa Timur. BNN menjelaskan kasus itu merupakan kasus lama dan sudah dipublikasikan.

Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Brigjen Sulistyو Pudo Hartono mengatakan kasus tersebut diungkap dalam Operasi Laut Interdiksi Terpadu Tahun 2023. Operasi itu ditutup di Pontianak pada 6 Juni 2023 dan berhasil mengungkap tiga kasus peredaran narkotika jaringan internasional.

"Memang ada pengungkapan kasus di tiga tempat pada waktu itu. Dengan hasil pengungkapan kasus di tiga tempat kejadian perkara (TKP), sebanyak 130,97 kg sabu. Dengan 11 orang tersangka," ujar Sulistyو saat dikonfirmasi Rabu (23/8/2023).

Jaringan pertama yang dibongkar yakni jaringan Malaysia-Tanjung Balai-Medan yang diungkap pada 14 Mei

2023. Sebanyak lima orang tersangka dan 2.096 kg barang bukti sabu diamankan petugas.

Kemudian, jaringan Malaysia-Surabaya yang diungkap pada 24 Mei 2023 di Jawa Timur. Dengan tersangka tiga orang dan barang bukti 108.045 kg sabu. Sulistyو pun menduga pengungkapan jaringan ini adalah kasus yang dimaksud Sahroni.

Selanjutnya, jaringan Malaysia-Tanjung Balai yang diungkap pada 26 Mei 2023. Sulistyو mengatakan pada pengungkapan ketiga ini, petugas mengamankan barang bukti sabu sebanyak 20.838 kg dengan tiga orang tersangka. "Sudah dipersilahkan, sudah lama dan sudah dimusnahkan barang buktinya. Pemusnahan di Bali tanggal 23 Juni 2023" ungkapnya.

Dia juga mengklarifikasi soal pernyataan Sahroni yang menyebut ada hambatan keluar masuk kontainer saat penangkapan itu. Menurut Sulistyو, hambatan terhadap kendaraan yang lalu lalang itu tak dapat dihindari saat pengungkapan berlangsung.

Dia mengatakan hal itu juga sebagai langkah antisipasi keamanan masyarakat. Sebab, kata dia, ada kemungkinan para tersangka membawa senjata api saat penangkapan. "Kalau terjadi tembak menembak gimana, tidak sesederhana orang bayangkan. Jadi mengungkap ratusan kg sabu itu kan ada potensi orang itu bersenjata dan lain-lain," ucap Sulistyو.

"Di mana, jika ada masyarakat atau korban yang terluka, operasi itu menjadi tidak bermanfaat," lanjutnya. Dia pun meminta maaf bila ada yang merasa perjalanannya terganggu. Jenderal bintang dua itu menuturkannya, pihaknya tak berniat mengganggu aktivitas masyarakat.

"Yang jelas niatnya tidak ada mengganggu. Niat kita saat kita melakukan penangkapan jangan sampai terdapat benturan tembak-menembak anggota BNN dengan jaringan," tuturnya. "Karena pasti ada yang namanya menangkap orang kan pasti ada menjaga keselamatan orang banyak gitu lo," pungkasnya. (ant,rls,janna/dya)

